

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pada bab ini peneliti menarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di lapangan serta telah peneliti bahas pada bab sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat upaya dan kendala pemerintah dalam proses penurunan angka stunting di Kota Padang pada tahun 2022, sehingga dengan demikian angka stunting di Kota Padang tidak mengalami penurunan. Pada upaya penurunan angka stunting, pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Diantaranya ialah membentuk rumah gizi untuk anak stunting, rumah gizi ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemberian makanan tambahan (PMT) dan pengukuran status gizi anak, tetapi juga sebagai tempat edukasi dan pendampingan langsung oleh tenaga kesehatan terkait praktik gizi seimbang dan pola asuh yang baik.

Kemudian, pemerintah melaksanakan kegiatan yang disebut dengan Mini Lokakarya dan Audit Kasus Stunting, Kegiatan Mini Lokakarya berfokus kepada peningkatan koordinasi lintas sektoral antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader posyandu, serta tokoh masyarakat dalam upaya menurunkan angka stunting di Kota Padang. Sedangkan Audit Kasus Stunting dilaksanakan untuk membahas hal-hal yang lebih serius terkait penanganan dan penyelesaian permasalahan stunting di Kota Padang. Selanjutnya, bentuk upaya lain yang dilakukan adalah dengan membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting dan Bapak Asuh Anak Stunting, serta adanya perencanaan intervensi penurunan stunting dengan melihat evaluasi dari pelaksanaan program tahun sebelumnya

apakah berjalan efektif atau tidak, sehingga dengan ini dibentuk strategi yang kolektif agar dapat dilakukan intervensi penurunan stunting secara maksimal.

Selain adanya upaya pemerintah dalam penurunan stunting ini, juga terdapat kendala dalam proses penurunan angka stunting di Kota Padang. Diantaranya adalah, minimnya partisipasi lintas sektoral seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam membawa anaknya ke posyandu dan sulitnya mengakomodasi pihak swasta agar terlibat dalam proses penurunan stunting di Kota Padang. Kemudian, belum maksimalnya pelaksanaan kebijakan dari penurunan angka stunting, mengingat tahun 2022 merupakan tahun pertama setelah dikeluarkannya kebijakan tentang intervensi penurunan stunting.

Tidak hanya itu, masih banyaknya masyarakat yang tidak terdata di Administrasi Kependudukan yang menjadi salah satu hambatan dalam proses penurunan stunting, masih banyaknya masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan, dan keterlibatan *stakeholder* dalam proses penurunan angka stunting yang tidak maksimal. Sehingga, dengan ini diperlukan peningkatan kerjasama lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, dan swasta serta perbaikan strategi komunikasi dan sosialisasi terkait program upaya pencegahan stunting untuk mencapai target penurunan stunting yang lebih efektif.

6.2 Saran

Peneliti memberikan saran agar program penurunan stunting dilakukan berdasarkan evaluasi dari pelaksanaan upaya percepatan penurunan angka stunting dari tahun sebelumnya serta kendala yang dihadapi. Selanjutnya, pelaksanaan penurunan angka stunting di Kota Padang membutuhkan komitmen dan upaya yang kuat serta kolaborasi dari berbagai *stakeholder* seperti pemerintah, masyarakat, dan

swasta untuk mewujudkan penurunan angka stunting di Kota Padang. Dengan adanya kolaborasi ini diharapkan intervensi yang dilakukan dapat berjalan secara maksimal.

Terkait dalam ranah akademis, peneliti menyarankan perlunya dilakukan penelitian yang lebih mendalam terkait *Collaborative Governance* dalam program percepatan penurunan angka stunting di Kota Padang serta Strategi Pemerintah Kota Padang dalam penurunan angka stunting mengingat upaya yang dilakukan sebelumnya belum berhasil dan melihat sejauh mana peran pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam menuntaskan permasalahan stunting.

